

---

---

## Pola Komunikasi Gender dalam Politik

Sari Ekowati<sup>1</sup>, Deby Puspitaningrum<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Bina Sarana Informatika; Indonesia

correspondence e-mail\*, [sari.ekowati.hadi@gmail.com](mailto:sari.ekowati.hadi@gmail.com)<sup>1</sup>; [debby.dby@bsi.ac.id](mailto:debby.dby@bsi.ac.id)<sup>2</sup>

---

Submitted: Revised: 01/11/2023 Accepted: 21/11/2023 Published: 30/11/2023

### Abstract

This study focuses on gender communication patterns in politics. The aim of this study is to analyze gender communication patterns, which are considered to still experience inequality in politics. The differences in communication styles depend on where he comes from, where he was born, his educational background, his age, and his gender. Whether we realize it or not, gender inequality occurs not only in society but also in the media as a gender constructor. Various gender injustices have occurred since the 19th century and are trying to break down patriarchal culture. Indonesia has a patriarchal culture that is still rooted, although it is slowly starting to erode due to the development of the modernization era. Women are now starting to dare to express their opinions in public spaces, such as in the political arena. But again and again, bitter pills always seem to be the daily intake of Indonesian women. Gender inequality is also felt by women who enter the world of politics. The incessant feminist movement has not changed the construction of women by the media. Gender inequality that occurs should be minimized with good gender-sensitive communication, without forgetting equality.

### Keywords

Communication Patterns, Gender, Politic

---



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Proses demokrasi sebagai sistem ideal yang diperjuangkan oleh sebuah bangsa yang menekankan semangat *'government of the people, by the people and for the people'* akan terbangun manakala partisipasi rakyat kuat tanpa memandang dimensi gender sebagai laki-laki atau perempuan.<sup>1</sup> Isu gender merupakan suatu isu yang menuntut keadilan konstruksi sosial maupun kultural antara kaum laki-laki dengan perempuan. Dalam tuntutan konstruksi ini, keseimbangan fungsi, status, dan hakekat antar jenis kelamin diharapkan dapat direalisasikan. Sebaliknya, pembangunan merupakan suatu konstruksi perubahan yang terjadi di masyarakat dari kondisi

---

<sup>1</sup> Rhesa Zuhriya Briyan Pratiwi, 'Mengkonstruksi Identitas Gender Pada Gerakan PKK', *Journal of Rural and Development*, VI.1 (2015), 85–100.

sosio-kultural tertentu menuju ke arah sesuatu yang dianggap lebih bernilai.<sup>2</sup> Polemik tentang masyarakat sipil juga tak lepas dari upaya menegakkan hak-hak sipil (*the civil rights*), termasuk hak-hak perempuan sehingga negara menjadi tidak adikuasa. Nilai penting yang melekat dari masyarakat sipil adalah partisipasi politik yang mana masyarakat baik laki-laki maupun perempuan turut mewarnai keputusan publik.<sup>3</sup>

Jika sekarang kebijakan politik quota sekurang-kurangnya 30% sesuai UU No. 7 Tahun 2017 sedang diperkuat realisasinya di tengah percaturan “politik perempuan” tingkat elite. Namun kebijakan politik apa yang berpihak bagi perempuan-perempuan marginal? Nyaris perempuan-perempuan marginal itu bak pepatah “habis manis sepah dibuang”.<sup>4</sup> Paska pemilu perempuan marginal terpaksa kesepian dan terasing dari gemerlap dan empuknya kursi politik. Harapan perempuan-perempuan itu sebenarnya sederhana, yaitu adanya harapan dan perbaikan ekonomi. Namun sudahkan harapan tersebut terpenuhi? Untuk itu komunikasi gender dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, ide, pemikiran, pengetahuan, konsep kepada orang lain secara timbal balik, baik sebagai ‘sender’ maupun ‘receiver’. Pola komunikasi politik menurut Suwarno mengartikan sempit dan luas merupakan titik tolak untuk membedakan gejala komunikasi politik dengan gejala lainnya. Komunikasi Politik dalam arti sempit adalah kurang lebih: setiap penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang tertulis ataupun tidak tertulis, dalam bentuk kata-kata terucapan, atau dalam bentuk isyarat yang dapat mempengaruhi secara langsung kedudukan seseorang yang ada dalam puncak suatu struktur kekuasaan dalam suatu sistem.<sup>5</sup>

Perempuan mampu mengikuti perkembangan zaman, berfikir, dan menyusun strategi bagi kebutuhan dirinya sendiri. Dan saat ini, partisipasi politik perempuan menghancurkan dikotomi atau konsep lingkungan privat atau publik, sehingga kekuatan dan kepemimpinan politik berada di tangan perempuan itu sendiri. Hanya saja perjuangan mencapai hak-hak perempuan dalam berpolitik seringkali digambarkan perjuangan yang menentang tradisi dan modernisasi, yang memaksa perempuan hanya aktif di lingkungan privat saja, artinya tinggal di rumah dan berperan

---

<sup>2</sup> Yayah Nurhidayah, ‘Pola Komunikasi Perempuan Pesisir: Studi Etnografi Komunikasi’, *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1.2 (2019), 89–108 <<https://doi.org/10.15575/cjik.v1i2.5060>>.

<sup>3</sup> Yayah Nurhidayah and Eti Nurhayati, *Psikologi Komunikasi Antar Gender*, Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2018.

<sup>4</sup> Pulung Abiyasa, ‘Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu’, *Jurnal Usm Law Review*, 2.2 (2019), 149 <<https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>>.

<sup>5</sup> Joni Suwarno, ‘Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan Ktp Dan Kk Di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)’, *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 1.2 (2015), 184–213 <<http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/810>>.

sebagai ibu rumah tangga, sedangkan laki-laki aktif di lingkungan publik, menempatkan laki-laki dalam posisi turut mengatur dan menentukan kondisi politik, ekonomi dan sosial masyarakat lokal.

Lalu, benarkah ada ketidaksetaraan gender dalam politik? Benarkan perempuan termarginalkan? Berbekal permasalahan ini adanya diskriminasi atau ketidaksetaraan gender. Jurnal ini hadir untuk membahas dan mengupasnya lebih dalam. Isu gerakan gender berasal dari Barat pada sekitar ± tahun 1980 (diresmikan) sedangkan tahun 1960-an sudah ada tetapi belum diresmikan yang sering disebut dengan istilah feminisme. Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Istilah gender pertama kali di perkenalkan oleh Robert Stoller (1968). Secara etimologi (bahasa), kata “jender” berasal dari bahasa Inggris, gender berarti “jenis kelamin”. Sedangkan secara terminologi (istilah), gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Adapun pengertian gender lainnya menurut Puspitawati (2012):<sup>6</sup>

1. Smith (1987); West & Zimmerman (1987) dalam Lloyd (2009) : Gender adalah suatu paket hubungan yang nyata di institusi sosial. Kemudian dihasilkan kembali dari interaksi antar personal.<sup>7</sup>
2. Butler (1990) dalam Lloyd et al. (2009): Gender dihasilkan pada tingkat ideologi.<sup>8</sup>

Tabel berikut ini menyajikan perbedaan konsep gender dan jenis kelamin:

**Tabel 1. Perbedaan Sex dan Gender**

No.	Aspek	Gender	Jenis Kelamin (Sex)
1	Dasar	Konstruksi Sosial	Takdir
2	Pendirian	Persepsi kultur (non-biologis)	Biologis
3	Status yang dibentuk	Feminin, maskulin. Contohnya: a. Perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan	Perempuan, laki-laki Contohnya: Laki-laki memiliki penis, dan

<sup>6</sup> Ivan Illich, *Matinya Gender* (Jakarta: Pustaka Belajar, 2007).

<sup>7</sup> Benny Ferdy Malonda, ‘Gender Interpretive Socio- Cultural Review : Women ’ s Position in Indonesian Society’, *Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 23.4 (2018), 29–33 <<https://doi.org/10.9790/0837-2304022933>>.

<sup>8</sup> Wendy O’Brien, Kathy Lloyd, and Caroline Riot, ‘Exploring the Emotional Geography of the Leisure Time Physical Activity Space with Mothers of Young Children’, *Leisure Studies*, 36.2 (2017), 220–30 <<https://doi.org/10.1080/02614367.2016.1203353>>.

		<p>keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa.</p> <p>b. Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peran perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab masalah rumah tangga.</p>	<p>memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui.</p>
4	Peran Sosial	<p>a. Peran sosial dapat berubah: peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pencari nafkah, disamping menjadi istri juga.</p> <p>b. Peran sosial dapat dipertukarkan: untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri. Atau sifat-sifat perempuan dan laki-laki dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang memiliki sifat lemah lembut dan keibuan dan ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.</p>	<p>a. Peran reproduksi tidak dapat berubah: sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya.</p> <p>b. Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.</p>
5	Jangkauan	Kelompok Sosial tertentu	Universal, seluruh dunia

Dan untuk mengetahui kaitan antara gender dan komunikasi dapat dilihat melalui beberapa teori perkembangan gender yang dikemukakan oleh para ahli komunikasi, psikologi dan ahli dalam disiplin ilmu yang lain. Terdapat lima teori perkembangan gender, yaitu:

1. Teori Psikodinamis (*Psychodynamic Theory*)

Akar teori ini adalah aliran psikoanalisis yang dirumuskan oleh *Sigmund Freud*. Teori ini melihat peran gender khususnya seorang ibu dalam sebuah keluarga sebagai pembentuk identitas gender. Anak laki-laki dan anak perempuan, membentuk identitas gender dalam hubungannya dengan ibu mereka. Anak perempuan biasanya lebih terhubung dengan

ibunya karena memiliki kesamaan biologis. Sedangkan anak laki-laki membentuk identitas gender yang berbeda karena tidak memiliki kesamaan biologis dengan sang ibu.

2. Teori Interaksi Simbolis (*Symbolic Interactionism Theory*)

Teori interaksi simbolis dirumuskan oleh *George Herbert Mead*. Teori ini, menyatakan bahwa gender dapat dipelajari dalam suatu proses komunikasi dalam konteks budaya. Menurut teori ini, anak laki-laki dan perempuan belajar bagaimana mereka di genderkan sebagai maskulin dan feminin melalui kata-kata (simbol) yang diungkapkan kepada yang lain (interaksi).

3. Teori Belajar Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori yang diungkapkan oleh Bandura yang menyatakan bahwa kita belajar bukan saja dari pengalaman langsung melainkan dari peniru dan peneladanan. Perilaku merupakan hasil faktor-faktor kognitif dan lingkungan (*Rakhmat, 2001:240-241*). Dalam kaitannya dengan pengembangan gender, teori ini lebih menekankan pada perilaku sebagai hasil dari faktor-faktor motivasional.<sup>9</sup>

4. Teori Belajar Kognitif (*Cognitive Learning Theory*)

Tidak seperti teori belajar sosial yang menekankan pada reward dan punishment, teori belajar kognitif menitikberatkan pada pengembangan gender ke dalam beberapa tingkatan. Suatu model yang dikemukakan oleh *Lawrence Kohlberg* menggambarkan bahwa anak-anak menyadari identitas gendernya sekitar usia tiga tahun. Namun, hal ini terus berubah hingga mereka menginjak usia lima atau tujuh tahun.

5. Teori Titik Berdiri (*Standpoint Theory*)

Budaya memegang peranan penting untuk memahami gender. Teori yang dirumuskan oleh *Patricia Collins and Sandra Harding* menyatakan bahwa ras dan kelas sosial penting. Keberadaan dua aspek tersebut mempengaruhi proses pembentukan identitas gender.

### **Teori Komunikasi Gender**

Proses komunikasi gender tidaklah sederhana, agar dapat deskripsi yang jelas mengenai komunikasi gender adalah dengan memahami berbagai teori komunikasi gender yang dirumuskan oleh para ahli komunikasi maupun ahli dari disiplin ilmu yang lain. Berikut adalah teori-teori komunikasi gender, yaitu:

---

<sup>9</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 2001).

1. *Genderlect Theory – Deborah Tannen*

Teori ini dirumuskan oleh Deborah Tannen yang memandang bahwa cara terbaik untuk menggambarkan komunikasi gender adalah dalam bentuk komunikasi lintas budaya. Perempuan selalu “*rapport talk*” untuk membangun hubungan yang berarti dengan yang lainnya. Sementara itu, laki-laki selalu menggunakan “*report talk*” untuk mendapatkan status dalam hubungannya dengan yang lain. Karena laki-laki dan perempuan menggunakan bahasa yang berbeda.

2. *Standpoint Theory – Sandra Harding and Julia Wood*

Pencetus teori ini menyatakan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hierarki sosial mempengaruhi apa yang dilihat. Terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam mempersepsikan apa yang dilihat. Menurut teori ini, perempuan berada di posisi yang paling rendah dibandingkan dengan laki-laki.

3. *Muted Group Theory – Cheris Kramarae*

Teori yang dikemukakan oleh *Cheris Kramarae* menyatakan bahwa berbagai kelompok sosial memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk apa yang kita alami dan ketahui sebagaimana kita memahami dan berkomunikasi dengan diri sendiri, orang lain dan dunia.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif atau konstruktivisme di mana data yang diperoleh diberikan makna.<sup>10</sup> Max weber pertama kali memperkenalkan dan menggunakan paradigma interpretif dalam kajian ilmu sosiologi,<sup>11</sup> lalu penggunaannya berkembang pada ilmu-ilmu sosial humaniora lainnya. Proses pemaknaan Instrument penelitian setelah pengumpulan data sebagai teknik pengumpulan data. Data berupa artikel-artikel yang diperoleh melalui menelusuran literatur dengan bantuan mesin pencari google scholar, juga buku-buku terkait dengan penelitian dan artikel-artikel terkait. Data yang telah ditampilkan kemudian dideskripsikan untuk menampilkan fakta. Fakta tersebut diinterpretasikan untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan. Zubaidah menjelaskan bahwa dalam menyusun kajian pustaka perlu usaha untuk mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya.<sup>12</sup> Sumber tersebut harus relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dapat digunakan

---

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Alfabeta, 2007).

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers., 2012).

<sup>12</sup> J. Alex Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2003).

dengan menggunakan dua pola; yaitu deduktif dan induktif. Dengan deduktif dimulai dari proposisi yang berlaku umum dan memberlakukannya pada keadaan khusus, serta belaku sebaliknya untuk induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi tanpa melibatkan perempuan Di dalamnya, pasti bukan demokrasi Sesungguhnya.<sup>13</sup> Walaupun dengan nuansa dan tekanan yang berbeda namun pada dasarnya manusia pada saat ini telah banyak yang menyepakati bahwa bentuk pemerintahan atau masyarakat yang demokratis adalah bentuk yang paling ideal jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk pemerintahan lainnya, seperti kerajaan, oligarki, otoritarian atau totalitarian. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa demokrasi adalah *'the best of the worse'* dari bentuk-bentuk pemerintahan dan masyarakat lain yang pernah ada atau masih ada di dunia ini. Tetapi sayangnya istilah demokrasi tidak dirasakan bagi sebagian kaum perempuan yang terjun di dunia politik.

Budaya patriarki yang bercokol erat di negeri ini membuat perempuan terkadang enggan untuk maju dalam kontestasi politik. Di dalam buku Ade Irma Sakina, Dessy Hasanah Siti A. (2017), menyoroti budaya patriarki di Indonesia, yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segala-galanya.<sup>14</sup> Di dalam buku Bressler, Charles E. *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice 4th-ed* juga disebutkan bahwasannya patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.<sup>15</sup> Sistem patriarki dalam dunia politik bisa saja terbentuk karena dalam sistem demokrasi rakyat lah yang menjadi penentu yang mengutamakan demokrasi dalam setiap mengambil keputusan.

Selama ini pendekatan perempuan terhadap politik pun sudah sering dilihat dari pengalaman sukses para aktivis-aktivis perempuan dalam berbagai konteks politik. Dimana langkah-langkah yang dibuat dapat membantu untuk memaksimalkan peluang untuk mencapai tujuan perempuan untuk ikut sepenuhnya dalam politik. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah bekerja sama dengan pihak laki-laki dan menunjukkan kepada laki-laki bahwa pemberdayaan perempuan tidak mengancam laki-laki. Malahan sebaliknya, hal itu membantu setiap orang dengan

---

<sup>13</sup> S Suriadi and others, 'Partisipasi Perempuan Dalam Politik Perspektif Pendidikan Islam Dan Gender', *Al ...*, 18.1 (2018), 247–70 <<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/843>>.

<sup>14</sup> Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah, 'Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia', *Social Work*, 7.1 (2014), 71–80.

<sup>15</sup> Alasdair Gibb, 'Ligand-Gated Ion Channel Receptor Mechanisms A + R AR \* A + R AR + A'.

membangun kemitraan yang berarti dan efisien.

Kedua, harus dapat membangun pola kemitraan yang berlandaskan penghargaan, pengetahuan, solidaritas dan dukungan di antara perempuan dan laki-laki. Semakin penting bagi perempuan dari berbagai masyarakat untuk saling berkomunikasi, mendukung usaha satu sama lain, saling mengajar dan belajar.

Ketiga, harus kerja sama erat dengan jaringan-jaringan dan organisasi-organisasi keadilan sosial yang lebih luas dalam semangat saling kerja-sama. Terutama yang penting dalam hal ini ialah organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang terlibat dalam promosi hak-hak azasi, advokasi lingkungan, hubungan perburuhan, promosi demokrasi dan resolusi damai dan konflik.

Keempat, harus sadar akan pentingnya membangun kemampuan pada tingkat individu dan tingkat masyarakat sipil. Dan harus mampu dalam mobilisasi, advokasi, mengidentifikasi isu-isu dan masalah-masalah serta mencari solusi. Ini semua terkait dengan membangun kemampuan sebagai pemimpin.

Kelima, kepemimpinan yang sangat penting bagi pemberdayaan perempuan, adalah konsep yang problematik. Yaitu tidak menghendaki kekuasaan hanya untuk kepentingan kekuasaan, tidak ingin memiliki kekuasaan sekedar untuk menjadi pengganti laki-laki. Tetapi perempuan ingin mendapatkan kekuasaan untuk membantu mengubah masyarakat agar menjadi lebih baik.

Dan keenam, perlu usaha agar suara perempuan di dengar. Sesuatu muncul dan berkembang dalam masa kita, yang dimasa lampau tidak ada, yaitu teknologi informasi. Sehingga teknologi ini harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk memperoleh dan membangun kemitraan untuk mengalang dukungan politik dan melaksanakan sebuah perubahan.

Tetapi langkah-langkah dan representasi perempuan di lembaga politik yang mati-matian diperjuangkan aktivis perempuan akan sia-sia jika perempuan tidak memilih perempuan. Apalagi di dalam menjalankan sebuah sistem pemeritahan di suatu negara demokrasi, maka harus mewakilkan keterlibatan perempuan dan menyerap aspirasi dari seluruh aspek masyarakat karena pada dasarnya aspirasi yang disampaikan merupakan sebuah kebutuhan yang diharapkan rakyat kepada pemerintah demi kebaikan dan kemajuan bersama bangsa dan negara dan dalam mengambil sebuah keputusan negara harus memperhatikan dari berbagai aspek masyarakat dan tidak boleh memihak.

### **Relasi Gender dalam Politik**

Relasi gender dapat diartikan sebagai relasi yang harmonis antara dua jenis yang berbeda

yaitu laki-laki dan perempuan. Menurut Nasaruddin Umar, relasi gender merupakan konsep dan realitas pembagian kerja sosial antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat normatif serta terkategori biologis, melainkan kualitas, skill, dan peran berdasarkan konvensi-konvensi sosial. Kedua jenis kelamin ini sering kali dilihat dari segi nilai, pekerjaan (*role*) dan perilaku. Dan jika perbedaan ini menonjol akan melahirkan ketidakadilan atau ada salah satu jenis yang dirugikan. Ketidakadilan ini mengakibatkan retaknya keharmonisan relasi antara laki-laki dengan perempuan. Oleh karena itu muncullah suatu reaksi yang diikuti tindakan struktural untuk menyusun kembali pola relasi laki-laki dan perempuan agar mencapai keseimbangan kesamaan status dan peran sosial guna menghilangkan ketimpangan gender di dalam masyarakat.

### **Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender**

Ketidakadilan gender dapat terjadi manakala perbedaan tersebut ternyata menimbulkan diskriminasi. Berikut diulas mengenai berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti yang disajikan dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia:

1. *Stereotype* atau Pelabelan

*Stereotype* adalah citra baku atau label atau cap yang diberikan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. *Stereotype* umumnya digunakan sebagai pembenaran suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok atas kelompok lainnya. *Stereotype* menunjukkan adanya ketimpangan atau ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan. Ketimpangan ini bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. *Stereotype* negatif seringkali disematkan pada perempuan. Misalkan perempuan dianggap cengeng.

2. Kekerasan

Kekerasan adalah tindak kekerasan yang dilakukan secara fisik maupun non fisik yang oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Dimana laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya.

3. Beban Ganda

Yang dimaksud dengan beban ganda adalah beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Perempuan memiliki peran reproduksi yang dianggap sebagai peran yang statis dan tidak dapat diubah.

Jumlah perempuan pekerja kini semakin banyak di wilayah publik, namun hal ini tidak mengurangi peran mereka di rumah. Dengan demikian perempuan memiliki beban kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

4. Marjinalisasi

Marjinalisasi adalah suatu proses peminggiran akibat adanya perbedaan jenis kelamin dan berakibat pada kemiskinan. Isu gender sering digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok, misalnya anggapan yang menyatakan bahwa perempuan memiliki fungsi sebagai pencari nafka tambahan. Ketika hal itu terjadi maka secara tidak langsung telah menyebabkan proses pemiskinan dengan gender sebagai alasannya. Misalnya banyak buruh perempuan yang rentan terkena pemutusan hubungan kerja.

5. Subordinasi

Penilaian atau anggapan bahwa peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Dalam masyarakat, perempuan hanya bertanggung jawab dalam hal reproduksi dan urusan rumah tangga. Sementara laki-laki berperan dalam urusan produksi.

Meskipun negara telah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negaranya melalui amanat Undang-Undang, namun kaum perempuan merasa adanya sebuah diskriminasi secara tidak langsung yang mempengaruhinya dan masih kurang dipercayai untuk bisa ikut ambil dalam kontestasi politik, sehingga hal itu menyebabkan keterlibatan perempuan dalam politik masih rendah dan sebagian besar dalam dunia politik itu sendiri selalu di duduki oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan diharapkan bisa dipercaya dan diberi kesempatan untuk bisa duduk di legislatif sehingga nantinya bisa tercipta sebuah sistem yang seimbang. Perempuan yang memiliki sifat yang lemah lembut harus diberi kesempatan yang sama dalam politik dan diberi kesempatan untuk bisa menjabat dan menduduki posisi strategis di dalam bidang politik, agar nantinya bisa mengeksploitasi dan mengimplementasikan kemampuan dan karakter dari perempuan itu sendiri sehingga nantinya melalui kepemimpinan perempuan bisa mensejahterahkan masyarakat melalui caranya.

## **KESIMPULAN**

Representasi kaum perempuan dalam kacamata perpolitikan di Indonesia sepertinya masih butuh waktu panjang dan perjuangan yang melelahkan pastinya. Karena bukan hanya menyangkut kapabilitas perempuan yang bisa dipertanggung jawabkan untuk mampu bersaing dengan laki-laki, tapi juga mampu berkontribusi dalam politik praktis secara signifikan. Sehingga perempuan bukan

hanya pelengkap kuota 30% dalam keterwakilan di dunia politik, bukan hanya sekedar pemanis dalam sebuah kontestasi politik, tapi mampu menunjukkan kekuatannya bersaing setara dengan laki-laki melalui pola komunikasi politik yang elegan.

Untuk itu perlu adanya upaya-upaya yang melibatkan pemangku kepentingan semua pihak, seperti pelaku politik, partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan pemerintah pastinya dalam mengupayakan kesetaraan gender disetiap pengambilan keputusan-keputusan dalam bingkai demokrasi yang setara 'frame pluralism demokratis' (non-patriarkis)

## REFERENSI

- Abiyasa, Pulung, 'Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu', *Jurnal Usm Law Review*, 2.2 (2019), 149 <<https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>>
- Gibb, Alasdair, 'Ligand-Gated Ion Channel Receptor Mechanisms A + R AR \* A + R AR + A'
- Illich, Ivan, *Matinya Gender* (Jakarta: Pustaka Belajar, 2007)
- Joni Suwarno, 'Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan Ktp Dan Kk Di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)', *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 1.2 (2015), 184–213 <<http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/810>>
- Malonda, Benny Ferdy, 'Gender Interpretive Socio- Cultural Review : Women ' s Position in Indonesian Society', *Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 23.4 (2018), 29–33 <<https://doi.org/10.9790/0837-2304022933>>
- Moleong, J. Alex, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2003)
- Nurhidayah, Yayah, 'Pola Komunikasi Perempuan Pesisir: Studi Etnografi Komunikasi', *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1.2 (2019), 89–108 <<https://doi.org/10.15575/cjik.v1i2.5060>>
- Nurhidayah, Yayah, and Eti Nurhayati, *Psikologi Komunikasi Antar Gender, Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI)*, 2018
- O'Brien, Wendy, Kathy Lloyd, and Caroline Riot, 'Exploring the Emotional Geography of the Leisure Time Physical Activity Space with Mothers of Young Children', *Leisure Studies*, 36.2 (2017), 220–30 <<https://doi.org/10.1080/02614367.2016.1203353>>
- Pratiwi, Rhesa Zuhriya Briyan, 'Mengkonstruksi Identitas Gender Pada Gerakan PKK', *Journal of Rural and Development*, VI.1 (2015), 85–100
- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah, 'Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia', *Social Work*, 7.1 (2014), 71–80
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers., 2012)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Alfabeta, 2007)
- Suriadi, S, A Adnan, J Jayadi, S Susilawati, and ..., 'Partisipasi Perempuan Dalam Politik Perspektif Pendidikan Islam Dan Gender', *Al ...*, 18.1 (2018), 247–70 <<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/843>>
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 2001)